



# Wantoro Harap Wali Kota Blusukan

## 1 Tahun Pemerintahan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi

**Kami sudah berikan waktu selama enam bulan untuk segera melakukan lelang (jabatan, Red). Tapi buktinya tidak pernah terlaksana. Ini sudah satu tahun," bebernya, Senin (21/5)**

**Sujanarko**  
Ketua DPRD Kota Yogyakarta

**YOGYA, TRIBUN** - Tepat hari ini, duet kepemimpinan Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS) dan Heroe Poerwadi (HP) memasuki usia satu tahun. Banyak hal yang terjadi selama tahun pertama ini, baik yang sudah dikerjakan maupun yang masih menjadi PR besar Pemerintah Kota Yogyakarta.

Wantoro, warga Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang juga merupakan Ketua RT 30 RW 08, menyebutkan bahwa kinerja Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi selama satu tahun ini cukup baik.

"Pembangunan benar-benar berjalan. Mulai dari tahud hingga sudah menadakan rumah kumuh. Kebersihan diutamakan hingga bisa dapat Adipura. Saya rasa bagus," ujarnya.

Ia pun menambahkan, bahwa seharusnya pihak RT dan RW yang menjadi ujung tombak di masyarakat mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. "Yang berurusan pertama kali dengan masyarakat adalah kita (RT/RW). Harapannya ada perhatian berupa insentif," ungkapnya.

Terkait masukan untuk kepemimpinan Haryadi-Heroe ke depan, Wantoro meminta agar keduanya lebih aktif untuk turun ke lapangan dan bertemu masyarakat. Hal tersebut dirasa penting untuk membangun kedekatan warga dengan pemerintahnya. "Kalau bisa blusukan, kayak Pak HZ (Herry Zudianto, Red) dulu," tambahnya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menuturkan, masih banyak hal yang harus dibenahi pemerintah, terutama terkait pegawai. Saat ini, terdapat sekitar 13 Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD yang untuk sementara waktu mengisi kursi jabatan definitif Kepala OPD.

Koko, sapaan akrabnya, menyangkan hal tersebut. Menurutnya, waktu satu tahun untuk bisa mengisi pejabat definitif di posisi tersebut sudah terlalu lama. Bahkan hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa kursi tersebut segera diisi pejabat definitif.

● ke halaman 19

## Wantoro Harap Wali Kota Blusukan

• Sambungan Hal 13

"Kami sudah berikan waktu selama enam bulan untuk segera melakukan lelang (jabatan, **Red**). Tapi buktinya tidak pernah terlaksana. Ini sudah satu tahun," bebarnya, Senin (21/5).

### Penegakan Perda

Hal lain yang ia ungkapkan adalah terkait penegakan peraturan daerah (perda) yang belum tegas. "Beberapa Perda belum bisa dieksekusi. Misalkan Perda Reklame yang sudah disahkan sejak 2015 dan melewati masa sosialisasi selama setahun," bebarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak mungkin terjadi bila pemimpinnya memiliki *political will* dan siap menjalankan semua peraturan yang telah disepakati bersama, maka semua akan berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

"Dewan melakukan pembahasan (perda), setelah jadi ya eksekutif yang harus mengeksekusi," ujarnya.

Selain itu juga politisi PDI-P tersebut menambahkan, Pemkot harus bisa menyesuaikan diri dalam membentuk dan menjalankan program yang juga selaras dengan program DIY yang menyongsong abad Samudera Hindia.

"Jangan sampai DIY punya program, tapi daerah tidak mendukung,

Harus selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," katanya.

### Kinerja PLT

Senada dengan Sujanar-ko perihal banyaknya PLT di Pemkot Yogyakarta, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Ali Fahmi berpendapat bahwa banyaknya PLT berdampak terhadap kinerja pegawai serta program pemerintah.

"Karena PLT tidak bisa mengambil keputusan strategis sesuai dengan perencanaan," jabarnya.

Terkait persoalan kemiskinan, di Kota Yogyakarta angka kemiskinan memang tidak sebanyak daerah lain di DIY. Walau demikian, jumlah yang sedikit tersebut juga perlu diantisipasi agar warga Kota Yogyakarta seluruhnya bisa mencapai kesejahteraan.

"Walaupun jumlahnya tidak bertambah, tapi sulit terentaskan. Butuh kebijakan strategis pengentasan kemiskinan," ucapnya.

### Gandeng Gandeng

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi sebelumnya menjelaskan, dalam satu tahun kepemimpinan duet Haryadi Suyuti (HS)-Heroe Poerwadi (HP), pihaknya berupaya memberdayakan masyarakat dengan program Gandeng Gandeng. Salah satu harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat menengah ke bawah untuk memberdayakan diri untuk membangkitkan ekonominya.

Heroe menjelaskan bah-

wa pihaknya menerapkan Sasaran Tunggal Langkah Bersama Gerakan Menuju Efisiensi Anggaran dan Capaian (Satu Langkah Gemilang).

"Selama ini OPD bekerja dengan sasaran yang berbeda. Sekarang saya minta OPD punya data dan sasaran yang sama," terangnya.

Ia menerangkan bahwa untuk mewujudkan sasaran tunggal pihaknya membutuhkan data tunggal terkait kemiskinan, kesejahteraan, dan penataan lingkungan. Data tunggal tersebut berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau nomor Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Saya minta Dinkes (Dinas Kesehatan) agar mendorong PIRT-nya," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa Satu Langkah Gemilang tersebut tak bisa dipisahkan dari program Gandeng Gandeng. Heroe mengungkapkan bahwa dari sisi produk, warga dinilai sudah mampu memproduksi, namun yang masih menjadi PR adalah tentang pemasaran produk.

"Mereka ini harus diundang dan diberikan arahan tentang *packaging* supaya menarik. Mal dan hotel juga bisa ikut memajang tanaman cantik yang dibudidayakan warga sekalian dipromosikan dan dijual di sana. Hotel juga mendapatkan manfaat dari sana," bebarnya. **(kur)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|--------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005